



AKOMODASI KEBUTUHAN HUNIAN DI LAHAN TERBATAS

Diusulkan Kombinasi Fasum dan Rumah Susun

YOGYA (KR) - Kebutuhan hunian bagi masyarakat setiap tahun dipastikan bertambah. Di tengah keterbatasan lahan, Pemkot diusulkan mengombinasikan fasilitas umum (fasum) dengan rumah susun.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Sigit Wicaksono, mengungkapkan salah satu konsep yang sudah diterapkan di daerah lain ialah membangun pasar tradisional bertingkat. Lantai dasar difungsikan sebagai pasar sedangkan lantai atas berupa rumah susun yang dapat disewa oleh masyarakat.

"Konsep itu saya kira bisa diterapkan di Kota Yogyakarta. Memang harus didahului dengan kajian, namun perlu segera dimulai karena kebutuhan hunian terus meningkat," ungkapnya.

Merujuk hasil kajian pada tahun 2015 lalu, ketersediaan lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai rumah mencapai 549.720 meter persegi. Jika mengacu pada asumsi setiap rumah membutuhkan lahan 100 meter persegi, maka lahan yang ada hanya mampu dibangun sebanyak 5.498 unit rumah. Padahal proyeksi kebutuhan rumah saat itu mencapai 101.526 unit sedangkan ketersediaan hanya 92.965 unit. Sehingga masih ada kekurangan sebesar 8.561 unit rumah.

Merupakan hal yang wajar jika pendirian apartemen tidak masuk dalam moratorium, akan tetapi belum banyak investor yang tertarik. Apalagi apartemen cenderung untuk mengakomodasi warga dengan ekonomi menengah ke atas karena lebih berorientasi pada bisnis.

Oleh karena itu, Sigit berharap usulan kombinasi fasum dengan rumah susun dapat ditindaklanjuti dengan kajian perencanaan. Jika memungkinkan untuk dibangun, maka bisa diawali dengan kegiatan revitalisasi pasar tradisional yang selanjutnya.

"Dengan konsep seperti itu maka beban lingkungan bisa ditekan. Bahkan tidak hanya dengan pasar, tapi juga bisa dikombinasikan dengan fasum lain seperti ruang pameran atau gedung pertemuan," jelasnya. (Dhi)-m

Hasil kajian tersebut, imbuh Sigit, masih cukup dinamis. Akan tetapi kondisi pada saat ini tetap tidak jauh berbeda. Terutama menyangkut ketersediaan lahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hunian. "Yang harus diperhatikan ialah warga dengan penghasilan rendah. Harga tanah dan bangunan pasti terus naik. Jika pemerintah tidak memfasilitasi, akan menjadi persoalan pelik di sektor infrastruktur," imbuhnya.

Kendati saat ini sudah terdapat beberapa rumah susun sewa sederhana, namun okupansinya sudah penuh. Begitu juga rumah susun yang tengah dibangun di wilayah Bener Tegalrejo, kelak akan diprioritaskan untuk warga bantaran sungai yang terdampak penataan. Di samping itu, meski

Tindak Lanjut

Untuk Ditangg

Untuk Diketa

Jumpa Pers

.....
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005